



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja

KPKNL PALU

2025

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji



PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu Tahun 2024 disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan kepada KPKNL Palu selama periode tahun 2025. Laporan Kinerja KPKNL Palu disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas instansi KPKNL Palu pada pihak yang memberi amanah sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palu. Disamping itu, Laporan Kinerja juga dapat digunakan sebagai alat kendali dan penilai kinerja secara kualitatif serta wujud transparansi instansi dalam rangka terwujudnya *good governance*.

Selama tahun 2025, KPKNL Palu telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam peta strategis KPKNL Palu Tahun 2025 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja KPKNL Palu Tahun 2025, terdiri dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam Laporan Kinerja KPKNL Palu akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2025 dengan kontrak kinerja tahun 2025, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPKNL Palu.

KPKNL Palu berupaya untuk terus mengoptimalkan kinerja dalam mencapai visi dan misi agar amanah yang diamanatkan dapat diselesaikan sesuai harapan. Selama tahun 2025, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palu mencapai **116,16%**.



Kami harapkan penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Palu Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan sebagai pertanggungjawaban KPKNL Palu atas upaya pencapaian visi dan misi yang dibebankan pada tahun 2025.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Palu



Ditandatangani secara elektronik
Jerry Max Nelson Piri



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| Latar Belakang | 1 |
| Tugas dan Fungsi | 1 |
| Struktur Organisasi | 3 |
| Peran Strategis | 5 |
| Isu Strategis | 8 |
| Tantangan / Hambatan | 10 |
| Sistematika Laporan | 11 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 13 |
| Rencana Strategis | 13 |
| Perjanjian Kinerja | 14 |
| Pengukuran Kinerja | 16 |
| Penjelasan Adendum Kontrak Kinerja | 17 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 18 |
| Capaian Kinerja Organisasi | 18 |
| Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya | 20 |
| Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Optimal | 22 |
| Sasaran Strategis 3 : Pelayanan Kekayan Negara Dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa | 25 |
| Sasaran Strategis 4 : Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif... .. | 26 |
| Sasaran Strategis 5 : Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, Dan Lelang Yang Profesional Dan Produktif..... | 28 |
| Sasaran Strategis 6 : Pengelolaan Keuangan Dan BMN Yang Akuntabel, Serta SDM Yang Adaptif | 31 |
| Sasaran Strategis 7 : Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif | 35 |

Sasaran Strategis 8 : Pengawasan Dan Pengendalian Internal
Serta Manajemen Risiko Yang Efektif.....

Laporan Kinerja | 2025

36

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan

Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 38

Kinerja Lainnya 39

Realisasi Anggaran 39

BAB IV PENUTUP 41

LAMPIRAN..... 43

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Palu dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

TUGAS DAN FUNGSI KPKNL PALU

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN memiliki instansi vertikal yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah dan 71 (tujuh puluh satu) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang / KPKNL.

KPKNL Palu merupakan salah satu instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara di Manado. KPKNL Palu mempunyai tugas untuk melaksanakan

pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Palu menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan Negara;
3. Registrasi, penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyimpanan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang Negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau pinjaman hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;

STRUKTUR ORGANISASI KPKNL PALU

Bagan 1.1
Struktur Organisasi KPKNL Palu



Salah satu kantor operasional DJKN yang beroperasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah KPKNL Palu yang berkedudukan di Kota Palu dengan wilayah kerja meliputi 13 kota/kabupaten yaitu:

1. Kota Palu,
2. Kabupaten Banggai,
3. Kabupaten Banggai Kepulauan,
4. Kabupaten Banggai Laut,
5. Kabupaten Buol,
6. Kabupaten Donggala,
7. Kabupaten Morowali,
8. Kabupaten Morowali Utara,
9. Kabupaten Parigi Moutong,
10. Kabupaten Poso,
11. Kabupaten Sigi,
12. Kabupaten Tojo Una-Una, dan
13. Kabupaten Toli-Toli.

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, KPKNL Palu memiliki **sumber daya manusia** berjumlah **28 pegawai** dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai KPKNL Palu Berdasarkan Jabatan dan Golongan

| No. | Jabatan | Golongan | | | | Jumlah |
|--------|--------------------|----------|----|-----|----|--------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1. | Pelaksana | - | 6 | 10 | 0 | 16 |
| 2. | Jabatan Fungsional | - | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3. | Eselon IV | - | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 4. | Eselon III | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | | - | 6 | 20 | 2 | 28 |

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai KPKNL Palu Berdasarkan Kelompok Umur dan Golongan

| No. | Umur | Golongan | | | | Jumlah |
|--------|-------|----------|----|-----|----|--------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1. | 18-30 | - | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 2. | 31-40 | - | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 3. | 41-50 | - | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 4. | > 50 | - | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Jumlah | | - | 6 | 20 | 2 | 28 |

Tabel 1.3

Komposisi Pegawai KPKNL Palu Berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | Golongan | | | | Jumlah |
|--------|---------------|----------|----|-----|----|--------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1. | Laki-laki | - | 2 | 12 | 1 | 15 |
| 2. | Perempuan | - | 4 | 8 | 1 | 13 |
| Jumlah | | - | 6 | 20 | 2 | 28 |

Tabel 1.4

Komposisi Pegawai KPKNL Palu Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

| No. | Jabatan | Golongan | | | | Jumlah |
|--------|----------|----------|----|-----|----|--------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1. | SLTA | - | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2. | D I | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | D III | - | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4. | S 1/D IV | - | 2 | 13 | 1 | 16 |
| 5. | S 2 | - | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Jumlah | | - | 6 | 20 | 2 | 28 |

PERAN STRATEGIS KPKNL PALU

KPKNL Palu sebagai instansi vertikal DJKN melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, visi dan misi organisasi sehingga tercapai pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. KPKNL Palu mempunyai peran/aspek strategis antara lain:

- a. **Subbagian Umum** yang merupakan bagian penunjang tugas dan fungsi KPKNL dan mempunyai tugas di bidang kepegawaian diantaranya:
- Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan formasi pegawai;
 - Melaksanakan administrasi kepegawaian seperti DP3, laporan LP2P, dan KP4;
 - Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - Mengurus permintaan Kartu Taspen, Karpeg, Askes; dan
 - Menyusun laporan absensi bulan kantor.

Sedangkan di bidang keuangan Subbagian Umum mempunyai tugas:

- Menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) berdasarkan dana yang tersedia dalam DIPA dan
- Menyelenggarakan pembayaran gaji/TKPN dan/atau penghasilan lainnya.

Pada bagian Penatausahaan BMN/Inventaris Kantor serta Pengadaan Barang dan Jasa, tugas Subbagian umum adalah:

- Menyelenggarakan inventarisasi BMN pada kantor pelayanan;
- Menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan barang/jasa keperluan kantor;

- Menyelenggarakan penyimpanan dan pendistribusian barang keperluan kantor; dan
- Menyusun konsep rencana penghapusan barang inventaris kantor.

Subbagian Umum juga mempunyai tugas dalam bidang Layanan Umum dan Laporan seperti :

- Menyelenggarakan urusan surat masuk dan keluar, dan penggandaan;
- Menyelenggarakan penyusutan arsip yang telah memenuhi jadwal retensi arsip;
- Melakukan pemasangan iklan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyelenggarakan kebersihan, keamanan dan upacara bendera;
- Menyusun bahan masukan konsep rencana strategi, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan; dan melaksanakan pembinaan kepada para pelaksana.

- Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara**, KPKNL Palu memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil gunaterutama difokuskan pada kegiatan utilisasi BMN, pengukuran kinerja BMN, pengamanan BMN, dan penatausahaan BMN. Untuk tahun 2025, fokus pengelolaan kekayaan negara ditujukan pada utilisasi BMN, evaluasi kinerja BMN, dan sertifikasi terhadap 269 NUP objek tanah yang terdiri atas 39 NUP dengan kategori K1, 14 NUP dengan kategori K2, dan 210 NUP dengan kategori K3.
- Seksi Pelayanan Piutang Negara**, KPKNL Palu memiliki peran strategis dalam rangka menyelamatkan keuangan negara. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penegakan hukum dalam penyelesaian pengurusan Piutang Negara/daerah baik kepada Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang Negara, KPKNL Palu berkontribusi dalam pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara;
- Seksi Hukum dan Informasi**, memiliki peran melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis,

laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

- e. **Seksi Kepatuhan Internal**, berperan dalam melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- f. **Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional di KPKNL Palu sesuai SK terdiri dari Pejabat Fungsional Pelalang, Penilai, dan Pranata Keuangan APBN, sedangkan Pejabat Juru Sita, Pemeriksa belum menjadi Pejabat Fungsional.
 - Pelayanan Penilaian, KPKNL Palu memiliki peran strategis dalam melakukan penilaian BMN dan barang jaminan piutang negara dengan tujuan untuk menentukan Nilai Wajar dan Nilai Likuidasi. Dalam setiap tahapan pengelolaan BMN khususnya penghapusan BMN, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau HBU). Selain itu KPKNL Palu juga membantu pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah (BMD), untuk menentukan nilai wajar dalam rangka pemindahtanganan BMD;
 - Pelayanan Lelang, KPKNL Palu memiliki peran strategis dalam memberikan layanan lelang yang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara adil dan transparan. KPKNL Palu juga terus berupaya menjadikan lelang sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales means auction*) dengan melakukan penggalian potensi lelang dan menyebarluaskan cara penjualan lelang kepada masyarakat luas. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya produk hukum risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Palu berkontribusi dalam pemasukan PNBPN berupa bea lelang. Saat ini KPKNL Palu juga sudah mengimplementasikan Lelang Internet (*e-auction*) yang memiliki banyak

keunggulan, diantaranya: lelang menjadi lebih mudah, dapat diakses di manapun dan kapanpun, lebih efisien karena tidak membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi bagi para pesertanya, penawaran lebih cepat dilakukan karena penawaran lelang dapat dilakukan begitu pengumuman lelang sudah diunggah di situs lelang DJKN dan penawaran langsung diterima dalam hitungan detik, dan yang penting juga *e-auction* ini telah memberikan kontribusi hasil lelang yang lebih optimal dibandingkan dengan lelang konvensional.

ISU STRATEGIS KPKNL PALU

Adapun Isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi pada KPKNL Palu dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Isu Strategis Seksi PKN adalah:

- Permintaan BMN berupa tanah oleh Satuan Kerja peruntukan Kantor atau Rumah Negara;
- Banyak Satuan Kerja yang memohon BMN, namun data yang dimiliki oleh KPKNL terbatas dari hasil pengukuran SBSK. Satuan Kerja diharapkan dapat menyampaikan kepada Pengelola BMN yang tidak teroptimisasi, sehingga terbentuk database untuk BMN Idle atau terindikasi Idle;
- Satuan Kerja tidak mau melepas BMN khususnya BMN berupa tanah yang Idle/tidak teroptimisasi;
- Banyak Satuan Kerja tetap mempertahankan BMN Idle, walaupun sudah bertahun tidak digunakan atau dilakukan pemanfaatan;
- Peningkatan kompetensi Operator BMN pada Satuan Kerja;
- Banyak operator BMN pada Satuan Kerja yang merangkap dengan tugas lain, atau kerap terjadi pergantian Operator BMN sehingga pemahaman operator BMN masih kurang dalam pengelolaan BMN.

b. Isu strategis Seksi Piutang Negara adalah:

Barang Jaminan yang kurang *marketable* sehingga piutang negara belum dapat terselesaikan.

c. Isu strategis Pelayanan Lelang adalah:

Permohonan dan target lelang PL I Tahun 2025 naik hampir 2 kali lipat dari Tahun 2024.

- d. Isu strategis Pelayanan Penilaian adalah:
- Terjadi peningkatan signifikan jumlah permohonan penilaian, baik penilaian BMN, BMD, maupun Barang Rampasan, yang menuntut peningkatan kecepatan dan kualitas layanan penilaian;
 - Proses pengajuan permohonan penilaian melalui aplikasi SIPDJKN belum sepenuhnya optimal, sehingga potensi efisiensi dan standarisasi proses penilaian belum dimanfaatkan secara maksimal;
 - Penilaian semakin berperan strategis dalam mendukung pengambilan keputusan negara, sehingga menuntut akurasi nilai, ketepatan waktu, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- e. Isu strategis Subbagian Umum adalah:
- Realisasi anggaran tahun berjalan;
 - Belanja modal (1 unit mobil dan 1 unit motor);
 - Pemanfaatan dan pemeliharaan aset dan persediaan;
 - Strukturisasi kepegawaian unit;
 - Usulan pemusnahan arsip inaktif.
- f. Isu strategis Seksi Hukum dan Informasi adalah:
- **Penguatan Penanganan Aspek Hukum KPKNL Palu**
Penanganan perkara hukum yang melibatkan KPKNL masih menjadi isu strategis nasional. Peningkatan kualitas pendampingan hukum, ketepatan penyusunan jawaban dan alat bukti, serta mitigasi risiko hukum sejak tahap awal proses bisnis KPKNL menjadi kebutuhan utama untuk menekan potensi kekalahan perkara dan tuntutan hukum;
 - **Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi Publik dan Kehumasan**
Tuntutan transparansi publik terhadap layanan DJKN semakin meningkat. KPKNL dituntut mampu menyajikan informasi yang cepat, akurat, mudah dipahami, serta konsisten di seluruh kanal komunikasi (website, media sosial, layanan langsung). Isu strategis terletak pada penguatan peran Seksi Hukum dan Informasi sebagai *gate keeper* informasi agar tidak terjadi misinformasi yang berdampak pada reputasi organisasi;

- **Optimalisasi Tata Kelola Data dan Aplikasi**

Masih adanya fragmentasi data dan ketergantungan pada berbagai aplikasi (SIMAN, FocusPN, lelang.go.id (Lelang Indonesia), SIP, dll.) menjadikan isu strategis berupa integrasi data, peningkatan keandalan sistem aplikasi, serta penguatan pengawasan dan validasi data agar informasi yang disajikan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk data yang bersinggungan/terintegrasi dengan Aplikasi Satu Kemenkeu melalui Nadine.

TANTANGAN/HAMBATAN

- a. Luasnya Wilayah kerja.
Luas provinsi Sulteng adalah ± 67.000 Km² yang terdiri dari 1 Kota dan 12 Kabupaten. KPKNL Palu juga melayani 405 satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga, perbankan, kejaksaan, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah sehingga koordinasi dengan pihak-pihak tersebut memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama, sedang biaya dan SDM yang tersedia terbatas.
- b. Terbatasnya SDM.
Dengan beban kerja sebagaimana disebutkan pada poin a di atas dan cakupan wilayah yang luas, saat ini KPKNL Palu didukung oleh 28 pegawai, dimana 3 pegawai melakukan Tugas Belajar.
- c. Kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran satker dalam pengelolaan BMN karena kurangnya dukungan peraturan yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palu.
- d. Belum memadainya infrastruktur dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palu seperti jaringan internet yang terkadang terkena kendala jaringan sehingga *bandwidth* menjadi lambat dan komputer pengolah data yang terbatas.
- e. Lokasi barang jaminan dan debitur yang sebagian berada di wilayah kurang strategis serta sulit diakses, sehingga berdampak pada belum optimalnya proses penyelesaian piutang negara/daerah baik dari aspek administrasi maupun pelaksanaan penagihan langsung di lapangan. Selain itu, masih terdapat beberapa berkas perkara permohonan lelang eksekusi yang diajukan oleh Pemerintah Daerah yang harus dikembalikan karena belum terpenuhinya dokumen penunjang yang dipersyaratkan.

- f. Ketidakseimbangan antara jumlah Pejabat Lelang dengan volume permohonan lelang serta target lelang yang ditetapkan, dimana pada tahun 2025 jumlah Pejabat Lelang hanya sebanyak 3 (tiga) orang, sementara permohonan lelang meningkat dari 976 permohonan pada tahun 2024 menjadi 1.726 permohonan pada 2025, seiring dengan kenaikan target pokok lelang PL I dari Rp. 40,1 Miliar pada tahun 2024 menjadi Rp. 77,7 Miliar pada tahun 2025.
- g. Kurang tepatnya realisasi anggaran dengan RPD, serta perlunya peningkatan dalam realisasi anggaran.
- h. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang dalam rangka penanganan perkara terkait sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas.

SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan, yang menguraikan secara umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang dihadapi organisasi.
2. BAB II : Perencanaan Kinerja
Bagian ini yang menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja KPKNL Palu Tahun 2024.
3. BAB III : Akuntabilitas Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang:
 - A. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan:
 1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
 3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
 - B. Kinerja lainnya
Bagian ini menguraikan kinerja lain yang dilakukan oleh KPKNL Palu selama Tahun 2025.

C. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. BAB IV : Penutup

Bagian ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Formulir Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah merupakan suatu proses yang dilakukan KPKNL Palu dalam menentukan strategi untuk melakukan kegiatan sesuai sistem. Untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi agar mempunyai keunggulan kompetitif, KPKNL Palu perlu menetapkan perjanjian kinerja dalam bentuk Kontrak Kinerja dengan seluruh pegawainya. Penetapan/perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Sepanjang tahun berjalan, dilaksanakan kegiatan bimbingan dan konsultasi secara berkala atas kinerja masing-masing pegawai dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja. Bimbingan dan konsultasi tersebut dilakukan oleh masing-masing atasan langsung secara berjenjang. Pada periode tahun berjalan juga dilakukan penilaian kinerja dan penilaian perilaku. Hasil dari penilaian tersebut dapat dijadikan umpan balik untuk proses pembimbingan dan konsultasi serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Pada tahun 2025, KPKNL Palu memiliki 19 (Sembilan Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan uraian dari 8 (delapan) Sasaran Strategis.

RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikiran tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam satu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020

tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024.

KPKNL Palu sebagai salah satu unit vertikal DJKN yang berada dibawah Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara memiliki rencana strategis untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja yang diharapkan, rencana strategis ini merupakan hasil turunan dari rencana strategis yang telah disusun oleh DJKN sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. KPKNL Palu berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang Negara, dan pelayanan lelang, yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam rangka mencapai tujuannya, KPKNL Palu memiliki strategi yang akan ditempuh. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Selaras dengan Renstra DJKN tahun 2020-2024, strategi KPKNL Palu yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel, optimal dan produktif;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

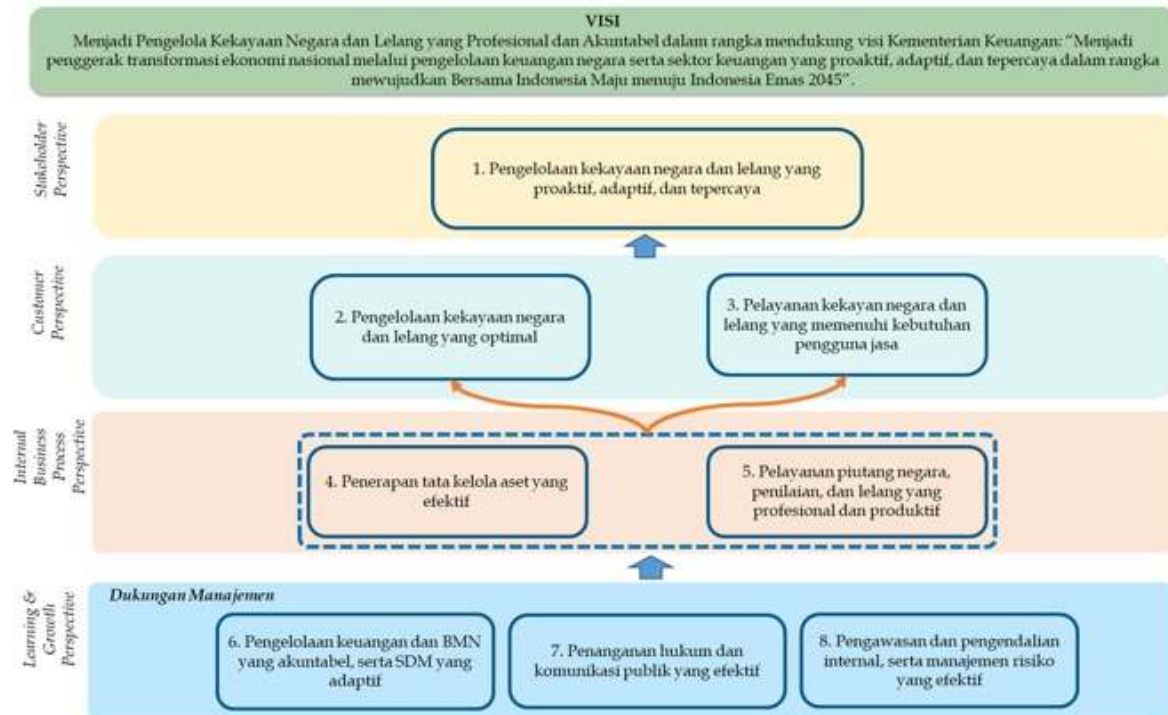
PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, telah dirumuskan dalam sasaran strategi KPKNL Palu Tahun 2025 yang tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Palu.

Bagan 2.1

Peta Strategi KPKNL Palu Tahun 2025



Pada Peta Strategi KPKNL Palu tersebut di atas menerapkan 4 perspektif, yaitu: Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective. Dari 4 perspektif yang diterapkan, ditetapkan 8 Sasaran Strategis, antara lain : (1) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya, (2) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal, (3) Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa, (4) Penerapan tata kelola aset yang efektif, (5) Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif, (6) Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif, (7) Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif, (8) Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif. Selanjutnya dari sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 19 Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2025. Keterkaitan antara sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | | Target |
|-----|--|-------------------|--|--------------------|
| 1 | Pengelolaan Kekayaan Negara yang proaktif, adaptif dan terpercaya | 1a-CP | Indeks integritas | 100 |
| | | 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% (Rp29,3M) |
| 2 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal | 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100% |
| | | 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% (Rp147,7M) |
| | | 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% (Rp1M) |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | 3a-CP | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 |
| | | 3b-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | 4a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipkatkan | 100% |
| | | 4b-CP | Persentase evaluasi kinerja BMN | 100% |
| 5 | Pelayanan Piutang Negara , Penilaian dan Lelang yang profesional dan produktif | 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% |
| | | 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% |
| | | 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | 80% |
| 6 | Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel , serta SDM yang adaptif | 6a-CP | Indeks kualitas Kinerja Anggaran | 100 |
| | | 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 |
| | | 6c-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 80% |
| 7 | Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif | 7a-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 |
| | | 7b-N | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal serta manajemen risiko yang efektif | 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 |
| | | 8b-N | Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100 |

PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengelola kinerja organisasi dan kinerja pegawainya serta mengukur capaian kinerja pada tahun 2024, KPKNL Palu berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yaitu KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian kinerja (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian IKU ditetapkan sebesar 120%;

2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize, minimize, maupun stabilize;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh indeks capaian IKU;
4. IKU yang telah ditetapkan, akan diupayakan secara optimal dengan realisasi pencapaiannya yang memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120% dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).

PENJELASAN ADENDUM KONTRAK KINERJA

Pada tahun 2025 KPKNL Palu tidak mendapatkan addendum kontrak kinerja pada seluruh IKU.

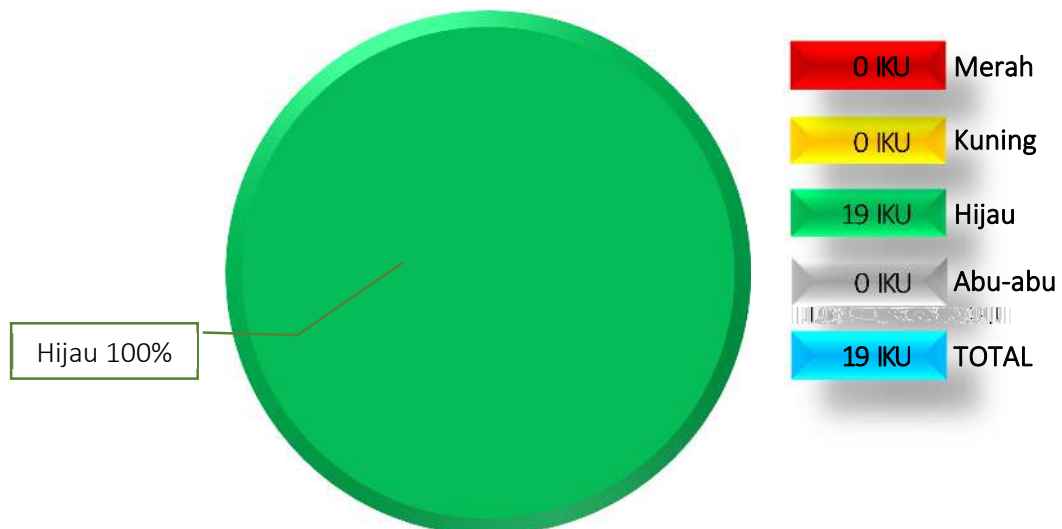
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Palu tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palu adalah sebesar 116,14%.

Bagan 3.1

Diagram Capaian Kinerja Organisasi KPKNL Palu Tahun 2025



Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada tiap perspektif sebagai berikut:

Tabel 3.1
Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Palu Tahun 2025

NILAI KINERJA ORGANISASI
 KPKNL PALU
 TAHUN 2025

| Kode | IKU | Polarisasi | V/C | Tingkat s.d | | Bobot IKU | Bobot Tertimbang IKU | Indeks Capaian IKU | Indeks Max. 120 | Nilai Sasaran Strategis | Nilai Perspective |
|--|--|------------|-----|-------------|-------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | Triwulan IV | Triwulan IV | | | | | | |
| Stakeholder Perspective (30%) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 111.30 | - |
| 1a-CP | Indeks Integritas | Max | P/L | 100.00 | 105 | 19.00% | 57.58% | 105.29 | 105.29 | 60.62 | 111.30 |
| 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | Max | P/M | 100.00% | 119.45% | 14.00% | 42.42% | 119.45 | 119.45 | 50.68 | - |
| Customer Perspective (20%) | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.26 | - |
| 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | Max | P/L | 100.00% | 101.56% | 19.00% | 36.54% | 101.56 | 101.56 | 37.11 | - |
| 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | Max | P/L | 100.00% | 143.30% | 19.00% | 36.54% | 143.30 | 120.00 | 43.85 | - |
| 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | Max | P/M | 100.00% | 283.83% | 14.00% | 26.92% | 283.83 | 120.00 | 32.31 | 116.63 |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.00 | - |
| 3b-N | Indeks kepuasan pengguna layanan ¹⁾ | Max | P/M | 77.00 | 96.15 | 14.00% | 50.00% | 124.87 | 120.00 | 60.00 | - |
| 3a-CP | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | Max | P/M | 74.00 | 93.66 | 14.00% | 50.00% | 126.57 | 120.00 | 60.00 | - |
| Internal Process Perspective (25%) | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.71 | - |
| 4a-CP | Persentase BMN berupa tanah yang disertipikan | Max | P/M | 100.00% | 130.48% | 14.00% | 50.00% | 130.48 | 120.00 | 60.00 | - |
| 4b-CP | Persentase evaluasi kinerja BMN | Max | P/M | 100.00% | 115.41% | 14.00% | 50.00% | 115.41 | 115.41 | 57.71 | - |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.00 | 118.85 |
| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara | Max | P/M | 100% | 139.09% | 14.00% | 33.33% | 139.09 | 120.00 | 40.00 | - |
| 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | Max | P/M | 70% | 110.24% | 14.00% | 33.33% | 157.48 | 120.00 | 40.00 | - |
| 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | Max | P/M | 80.00% | 120.00% | 14.00% | 33.33% | 150.00 | 120.00 | 40.00 | - |
| Learning and Growth Perspective (25%) | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akurat, serta SDM yang adaptif | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.00 | - |
| 6a-CP | Indeks kualitas kinerja anggaran | Max | P/M | 100.00 | 120 | 14.00% | 33.33% | 120.00 | 120.00 | 40.00 | - |
| 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | Max | P/M | 100.00 | 120 | 14.00% | 33.33% | 120.00 | 120.00 | 40.00 | - |
| 6c-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | Max | P/M | 80.00% | 98.0% | 14.00% | 33.33% | 122.50 | 120.00 | 40.00 | - |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | - | - | - | - | - | - | - | - | 118.03 | 118.85 |
| 7a-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | Max | P/M | 100.00 | 116.07 | 14.00% | 50.00% | 116.07 | 116.07 | 58.03 | - |
| 7b-N | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | Max | P/M | 80.00 | 112.75 | 14.00% | 50.00% | 140.94 | 120.00 | 60.00 | - |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | - | - | - | - | - | - | - | - | 118.52 | - |
| 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko | Max | P/M | 80.00 | 93.63 | 14.00% | 50.00% | 117.04 | 117.04 | 58.52 | - |
| 8b-N | Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zi-WBK/WBBM | Max | P/M | 100.00 | 120.00 | 14.00% | 50.00% | 120.00 | 120.00 | 60.00 | - |
| NKO | | | | | | | | | | | 116.14 |

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 19 (sembilan belas) IKU Kemenkeu-Three Tahun 2024 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Three sebagai berikut :

A. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1. 1a-CP Indeks Integritas

Indeks Integritas Organisasi merupakan IKU baru pada tahun 2023. Pada tahun 2025, target indeks integritas pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 100 dan telah tercapai sebesar 105,29%.

Tabel 3.2

Capaian IKU Indeks Integritas Tahun 2025

| KPKNL Palu | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya | | | | | | | |
|---------------|---|-----|------|-----|--------|--------|--------|-------------|
| | 1a-CP Indeks Integritas | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Max/ TLK |
| Realisasi | 100 | 100 | 120 | 122 | 122 | 105,29 | 105,29 | |
| Capaian | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 105,29 | 105,29 | |

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Indeks Integritas Organisasi Tahun 2024-2025

| Tahun/Uraian | Target Awal | Target Adendum | Realisasi | %Realisasi Awal | %Realisasi Adendum |
|--------------|-------------|----------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 2023 | 88,67 | | 89,17 | 100,56% | |
| 2024 | 89,17 | | 92,44 | 103,67% | |
| 2025 | 100 | | 105,29 | 105,29% | |

Langkah-langkah strategis KPKNL Palu dalam mewujudkan organisasi yang berintegritas, sebagai berikut :

- Secara rutin melakukan pemantauan Pengendalian Utama Layanan
- Melakukan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.
- Melakukan Internalisasi Kode Etik dan kode Perilaku melalui kegiatan Sharing Knowledge.
- Melakukan pemantauan terhadap Pengaduan Masyarakat;
- Melakukan Profiling Pegawai

2. 1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan Lelang

Pada tahun 2025, target penerimaan negara berupa PNBPN pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar Rp29.349.200.000,00 dan telah tercapai realisasi penerimaan negara sebesar Rp35.058.426.322,00 atau sebesar 119,45% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.4

Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2025

| KPKNL Palu | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya | | | | | | | |
|------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | 1b-CP Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Max/ TLK |
| Realisasi | 169,8 3% | 140,05% | 140,05% | 128,80% | 128,80% | 119,45% | 119,45% | |
| Capaian | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119,45 | 119,45 | |

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2021-2025

| Tahun/Uraian | Target Awal | Target Adendum | Realisasi | %Realisasi Awal | %Realisasi Adendum |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2021 | | | | | |
| PNBP BMN | 7.500.000.000 | | 9.001.324.191 | 120,02% | |
| PNBP PN | 8.000.000 | | 126.139.920 | 1576,75% | |
| PNBP Lelang | 3.430.000.000 | | 4.647.936.643 | 135,51% | |
| 2022 | | | | | |
| PNBP BMN | 11.230.000.000 | | 15.393.400.543 | 137,07% | |
| PNBP PN | 5.000.000 | | 21.594.593 | 431,89% | |
| PNBP Lelang | 3.400.000.000 | | 5.382.148.782 | 158,30% | |
| 2023 | | | | | |
| PNBP BMN | 9.210.000.000 | | 20.194.518.623 | 219,27% | |

| Tahun/Uraian | Target Awal | Target Adendum | Realisasi | %Realisasi Awal | %Realisasi Adendum |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| PNBP PN | 210.000.000 | | 464.564.979 | 221,22% | |
| PNBP Lelang | 5.400.000.000 | | 4.397.100.919 | 81,43% | |
| 2024 | | | | | |
| PNBP BMN | 10.600.000.000 | | 22.665.360.337 | 213,82% | |
| PNBP PN | 15.200.000 | | 48.790.124 | 320,99% | |
| PNBP Lelang | 5.450.000.000 | | 4.725.631.233 | 86,71% | |
| 2025 | | | | | |
| PNBP BMN | 23.683.200.000 | | 28.939.469.309 | 122,2% | |
| PNBP PN | 5.654.000.000 | | 5.654.000.000 | 108% | |
| PNBP Lelang | 12.000.000 | | 12.000.000 | 100,8% | |

Langkah-langkah strategis KPKNL Palu dalam pencapaian target, sebagai berikut

- Sosialisasi dan penggalian potensi pengelolaan BMN melalui pemanfaatan dan penjualan BMN kepada para satuan kerja yang intens;
- Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah terkait realisasi PNBP BMN, Biad PPN, dan Bea Lelang pada Aplikasi OM SPAN;
- Penggalian potensi lelang juga banyak dilakukan kepada pihak Pemerintah Daerah dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD);
- Melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan penyerah Piutang Negara

B. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Optimal.

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1. 2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan asset negara merupakan IKU baru pada tahun 2025. Pada tahun 2025, target indeks integritas pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 100 dan telah tercapai sebesar 101,56%.

Tabel 3.6

Capaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara Tahun 2025

| KPKNL Palu | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal | | | | | | | |
|---------------|---|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|
| | 2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 50% | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% | Max/ |
| Realisasi | 60% | 110,83% | 110,83% | 87,19% | 87,19% | 101,56% | 101,56% | TLK |
| Capaian | 120% | 120% | 120% | 108,9% | 108,9% | 101,56% | 101,56% | |

Langkah-langkah yang diambil KPKNL Palu dalam pencapaian target, sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan satker.
- b. Melakukan pendampingan dalam pengisian formulir pendataan BMN.

2. 2b-CP Persentase realisasi pokok Lelang

Pada tahun 2025, target realisasi pokok lelang pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar Rp147.700.000.000,00 dan telah tercapai realisasi sebesar Rp211.653.265.480,00 atau sebesar 143,30% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.7

Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2025

| KPKNL Palu | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal | | | | | | | |
|---------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | 2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Max/ |
| Realisasi | 222,36% | 147,22% | 147,22% | 124,69% | 124,69% | 143,30% | 143,30% | TLK |
| Capaian | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2021-2025

| Tahun/Uraian | Target Awal | Target Adendum | Realisasi | %Realisasi Awal | %Realisasi Adendum |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 2021 | 106.000.000.000 | | 200.889.103.431 | 189,52% | |
| 2022 | 103.000.000.000 | | 205.513.408.617 | 199,53% | |
| 2023 | 204.000.000.000 | | 181.611.802.638 | 89,03% | |
| 2024 | 194.100.000.000 | | 167.298.653.929 | 86,19% | |
| 2025 | 147.700.000.000 | | 211.653.265.480 | 143,30% | |

Dalam pencapaian target realisasi pokok lelang ini, KPKNL Palu telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan penggalan potensi lelang kepada calon pemohon lelang yaitu perbankan, pegadaian, pemerintah daerah, dan satker Kementerian/Lembaga.
- b. Melakukan publikasi terkait pelaksanaan lelang online serta melalui media sosial.
- c. Melakukan sosialisasi portal lelang versi terbaru kepada pengguna jasa/stakeholder.

3. 2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

Pada tahun 2025, persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 100 % (Rp 1.000.000.000,00) dan telah tercapai realisasi sebesar Rp 2.838.328.403,00 atau sebesar 283,83% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.9

Capaian IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara Tahun 2025

| KPKNL Palu | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal | | | | | | | |
|---------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | 2c-CP Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Max/ TLK |
| Realisasi | 187,91% | 228,61% | 228,61% | 136,48% | 136,48% | 283,83% | 283,83% | |
| Capaian | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Tabel 3.10

**Perbandingan Realisasi Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang
Negara Tahun 2021-2025**

| Tahun/Uraian | Target Awal | Target Adendum | Realisasi | %Realisasi Awal | %Realisasi Adendum |
|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2021 | 1.662.000.000 | | 2.301.476.642 | 138,48% | |
| 2022 | 1.000.000.000 | | 1.810.548.458 | 181,05% | |
| 2023 | 6.886.134.353 | | 7.687.266.007 | 111,63% | |
| 2024 | 1.350.000.000 | | 2.863.572.455 | 212,12% | |
| 2025 | 1.000.000.000 | | 2.838.328.403 | 283,83% | |

Dalam pencapaian target penurunan outstanding piutang negara ini, KPKNL Palu telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang
- b. Melakukan penagihan secara langsung dengan pendekatan non eksekusi
- c. Melakukan penggalian potensi dan melakukan analisis PSBDT
- d. Melakukan sosialisasi door to door terkait Crash Program atau Pemberian Keringanan Hutang kepada seluruh Penanggung Hutang yang memenuhi kualifikasi awal

C. Sasaran Strategis 3 : Pelayanan Kekayan Negara Dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1. 3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan IKU baru pada tahun 2025. Pada tahun 2025, target Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 74 dan telah tercapai sebesar 93,66 atau 126,57% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.11

Capaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Tahun 2025

| KPKNL | Pelayanan keadilan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | | | | | | | |
|-----------|--|-------|---------|--------|--------|-------|-------|--------|
| Palu | 3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | Max/ |
| Realisasi | 85 | 92,44 | 88,72 | 105,59 | 94,43 | 91,37 | 93,66 | AVG |
| Capaian | 114,86% | 120% | 119,89% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Palu, sebagai berikut :

Sosialisasi Jabatan Fungsional Pelelang telah dilaksanakan sesuai dengan KAK yang telah disusun.

2. 3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan

IKU Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan IKU baru pada tahun 2025. Pada tahun 2025, target Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 77 dan telah tercapai sebesar 96,15 atau 124,87% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.11

Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan Tahun 2025

| KPKNL | Pelayanan keadilan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | | | | | | | |
|-----------|--|-------|-------|-------|--------|------|-------|--------|
| Palu | 3a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | Max/ |
| Realisasi | 95,80 | 94,60 | 95,20 | 96,40 | 95,87 | 97 | 96,15 | AVG |
| Capaian | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Palu, sebagai berikut :

Menyebarkan kuesioner kepada stakeholders dan melakukan perhitungan IKPL KPKNL Palu triwulan IV 2025

D. Sasaran Strategis 4 : Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif
Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1. 4a-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan

Pada tahun 2025, target persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 397 bidang tanah dan telah tercapai sebesar 518 bidang tanah atau sebesar 130,48% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.13

**Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan
Tahun 2025**

| KPKNL Palu | Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif | | | | | | | |
|---------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | 4a-CP Persentase BMN Berupa Tanah yang disertipikatkan | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 20 | 159 | 159 | 239 | 239 | 397 | 397 | Max/ |
| Realisasi | 210% | 125,15% | 125,15% | 100,83% | 100,83% | 130,48% | 130,48% | TLK |
| Capaian | 120% | 120% | 120% | 100,83% | 100,83% | 120% | 120% | |

Tabel 3.17

**Perbandingan Realisasi Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang
Disertipikatkan Tahun 2021-2025**

| Tahun/Uraian | Target Awal | Target Adendum | Realisasi | %Realisasi Awal | %Realisasi Adendum |
|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 2021 | 1.638 bidang | | 1.742 bidang | 106,35% | |
| 2022 | 2.858 bidang | | 3.436 bidang | 120,22% | |
| 2023 | 604 bidang | | 860 bidang | 142,38% | |
| 2024 | 737 bidang | | 1.475 bidang | 200,14% | |
| 2025 | 397 bidang | | 518 bidang | 130,48% | |

Langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Palu, sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi secara langsung dengan Kanwil BPN Sulawesi Tengah dan kantor pertanahan di wilayah kerja KPKNL Palu;
- b. Melakukan koordinasi secara formal dan informal kepada satker di wilayah kerja KPKNL Palu yang menjadi target sertifikasi tanah, termasuk pendampingan langsung untuk melengkapi dokumen kepemilikan tanah.

2. 4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN

Pada tahun 2025, target persentase evaluasi kinerja bmn (portofolio aset) pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 689 NUP dan telah tercapai sebesar 769 NUP atau sebesar 115,41% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.18

Capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2025

| KPKNL Palu | Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif | | | | | | | |
|---------------|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| | 4b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 15% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% | Max/ |
| Realisasi | 0,46% | 73,49% | 73,49% | 97,58% | 97,58% | 115,41% | 115,41% | TLK |
| Capaian | 0,46% | 73,49% | 73,49% | 97,58% | 97,58% | 115,41% | 115,41% | |

Tabel 3.19

Perbandingan Realisasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2021-2025

| Tahun/Uraian | Target Awal | Target Adendum | Realisasi | %Realisasi Awal | %Realisasi Adendum |
|--------------|-------------|----------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 2021 | 27 NUP | | 34 NUP | 125,93% | |
| 2022 | 196 NUP | | 212 NUP | 110,74% | |
| 2023 | 157 NUP | | 165 NUP | 120% | |
| 2024 | 167 NUP | | 212 NUP | 120% | |
| 2025 | 689 NUP | | 769 NUP | 115,41% | |

Dalam pencapaian target evaluasi kinerja BMN, KPKNL Palu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap satker yang menjadi target evaluasi kinerja BMN;
- b. Melakukan pendampingan kepada satker dalam pengisian formulir pendataan;
- c. Melakukan survei lapangan evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

E. Sasaran Strategis 5: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, Dan Lelang Yang Profesional Dan Produktif

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1. 5a-CP Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

Pada tahun 2025, target realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 100% dan telah tercapai sebesar 139,09% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.20

Capaian IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Kasus Piutang Negara Tahun 2025

| KPKNL Palu | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | | | | | | | |
|---------------|--|------|------|------|--------|---------|---------|--------|
| | 5a-CP Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Max/ |
| Realisasi | 165% | 132% | 132% | 125% | 125% | 139,09% | 139,09% | TLK |
| Capaian | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Palu, sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang;
- b. Melakukan penagihan secara langsung dengan pendekatan non eksekusi;
- c. Melakukan penggalan potensi dan melakukan analisis PSBDT;
- d. Melakukan sosialisasi door to door terkait Crash Program atau Pemberian Keringanan Hutang kepada seluruh Penanggung Hutang yang memenuhi kualifikasi awal

2. 5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian

Pada tahun 2025, target Tingkat kualitas layanan penilaian pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 70% dan telah tercapai sebesar 157,48% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.21

Capaian IKU Tingkat kualitas layanan penilaian Tahun 2025

| KPKNL Palu | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | | | | | | | |
|---------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Max/ |
| Realisasi | 108,36 | 108,25 | 108,30 | 109,12 | 108,58 | 114,05 | 110,24 | TLK |
| Capaian | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Tabel 3.22

Perbandingan Realisasi Tingkat kualitas layanan penilaian Tahun 2023-2025

| Tahun/Uraian | Target Awal | Target Adendum | Realisasi | %Realisasi Awal | %Realisasi Adendum |
|--------------|-------------|----------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 2023 | 70 | | 86,39 | 120% | |
| 2024 | 70 | | 97,76 | 130,35% | |
| 2025 | 70 | | 110,24 | 157,48% | |

Langkah-langkah strategis KPKNL Palu dalam pencapaian target, sebagai berikut :

- a. Mempercepat jangka waktu penyelesaian layanan penilaian terhadap permohonan penilaian
- b. Melibatkan pegawai yang berkompeten dari luar fungsional penilai sebagai anggota tim penilai untuk permohonan penilaian dengan jumlah objek penilaian yang banyak
- c. Meminta petunjuk/arahan dari Fungsional Penilai pada Kantor Wilayah maupun Kantor Pusat DJKN terkait permohonan penilaian yang memiliki kompleksitas tinggi atau belum pernah dilakukan sehingga mempercepat Penyelesaian Layanan Penilaian.

3. 5c-CP Persentase produktivitas lelang

Pada tahun 2025, target persentase produktivitas lelang pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 80% dan telah tercapai sebesar 120% atau 150% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.23

Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2025

| KPKNL Palu | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif | | | | | | | |
|---------------|--|--------|--------|---------|---------|------|------|--------|
| | 5c-CP Persentase produktivitas lelang | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 30% | 40% | 40% | 70% | 70% | 80% | 80% | Max/ |
| Realisasi | 64,96% | 79,24% | 79,24% | 106,55% | 106,55% | 120% | 120% | TLK |
| Capaian | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Tabel 3.24

Perbandingan Realisasi Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2021-2025

| Tahun/Uraian | Target Awal | Target Adendum | Realisasi | %Realisasi Awal | %Realisasi Adendum |
|--------------|-------------|----------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 2021 | 35% | | 40,95% | 117,01% | |
| 2022 | 36% | | 98,51% | 273,64% | |
| 2023 | 80% | | 105% | 120% | |
| 2024 | 89% | | 114,18% | 128,29% | |
| 2025 | 80% | | 120% | 150% | |

Dalam rangka meningkatkan produktivitas lelang pada tahun 2025, KPKNL Palu telah melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat, terkait akun Mitra Kantor Pertanahan untuk penerbitan SKPT yang bermasalah.
- b. Memberikan Himbauan kepada pengguna jasa/pemohon lelang, khususnya perbankan dalam rangka mitigasi lelang batal khususnya lelang eksekusi Hak Tanggungan.
- c. Percepatan verifikasi dokumen lelang, sehingga semakin banyak permohonan lelang yang masuk dengan harapan semakin banyak lelang yang dilaksanakan.
- d. Melakukan publikasi terkait pelaksanaan lelang online serta melalui media sosial.

F. Sasaran Strategis 6: Pengelolaan Keuangan Dan BMN Yang Akuntabel, Serta SDM Yang Adaptif

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1. 6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran

Untuk Indeks Kualitas Kinerja Anggaran KPKNL Palu telah mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar 120,00% dari target 100,00%, mempartahankan realisasi capaian tahun sebelumnya sebesar 120,00% dari target 100,00%. Dalam IKU ini digunakan Formula Konversi Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Triwulan IV berupa $NKA > 95,00$ untuk indeks 120,00. Realisasi NKA KPKNL Palu Tahun Anggaran 2025 sebesar 99,82. Hasil NKA diambil dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan perhitungan unsur nilai revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, data konfirmasi Capaian Output, dan dispensasi SPM sebagai nilai pengurang. Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KPKNL Palu Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 100, sedangkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran berdasarkan aplikasi Smart sebesar 99,64.

Selama tahun 2025 KPKNL Palu telah melaksanakan pengelolaan anggaran dengan baik dan berhasil. Pelaksanaan anggaran yang telah optimal ini harus menjadi evaluasi agar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan baik, terencana, dan terorganisir dengan baik serta mengacu pada kontrak kinerja Kemenkeu-three. Kendala yang dialami yaitu nilai penyerapan anggaran atas pagu belanja barang (52) yang masih belum maksimal dengan diturunkannya beberapa kebijakan efisiensi anggaran pada tahun berjalan. Dalam hal tersebut, KPKNL Palu berupaya melakukan pemetaan RPD yang lebih terstruktur dan mengintruksikan seluruh teknis, fungsional, dan subbagian untuk membuat rencana kerja berupa perjalanan dinas dan belanja bahan maupun operasional lainnya secara bertahap.

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan KPKNL Palu berasal sepenuhnya dari APBN yang dituangkan dalam DIPA nomor SP DIPA-015.09.2.538002/2025 Tanggal 02 Desember 2024 yang terinci dalam tabel berikut.

Tabel 3.29
Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan KPKNL Palu

| No | Uraian | Pagu DIPA | Blokir | Sisa Pagu | Realisasi | |
|--------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | Rp | % |
| 1 | Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belanja Barang | 2.421.592.000 | 303.951.000 | 100.097.158 | 2.017.543.842 | 95,27 |
| 3 | Belanja Modal | 427.390.000 | 14.700.000 | 752.087 | 411.937.913 | 99,82 |
| Total | | 2.848.982.000 | 318.651.000 | 100.849.245 | 2.429.481.755 | 96,01 |

Pada tahun 2025, KPKNL Palu tidak memiliki DIPA untuk Belanja Pegawai, besarnya realisasi DIPA untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp2.429.481.755,00 dari target sebesar Rp2.848.982.000,00. Realisasi penyerapan DIPA untuk Tahun Anggaran 2025 dimaksud telah sesuai digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, dan dari aspek keuangan itu sendiri telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara.

Pada tahun 2025, target indeks kinerja anggaran pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 100,00 dan telah tercapai sebesar 120,00 atau sebesar 120% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.30

Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran Tahun 2025

| KPKNL Palu | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | | | | | | | |
|---------------|---|---------|---------|---------|---------|------|------|-------------|
| | 6a-CP Indeks Kinerja Anggaran | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Max/ TLK |
| Realisasi | 120 | 117,53 | 117,53 | 118,60 | 118,60 | 120 | 120 | |
| Capaian | 120% | 117,53% | 117,53% | 118,60% | 118,60% | 120% | 120% | |

Tabel 3.31

Perbandingan Realisasi Indeks Kinerja Anggaran Tahun 2021-2025

| Tahun/Uraian | Target Awal | Target Adendum | Realisasi | %Realisasi Awal | %Realisasi Adendum |
|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| 2021 | 95,5% | | 96,34% | 100,16% | |
| 2022 | 95,5% | | 96,85% | 101,41% | |
| 2023 | 100% | | 95.61% | 95.61% | |
| 2024 | 100% | | 120% | 120% | |
| 2025 | 100% | | 120% | 120% | |

Langkah-langkah KPKNL Palu dalam mencapai target tersebut, sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan anggaran dengan baik dan detil dengan melibatkan seluruh unit terkait;
- b. Mendorong realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang ditetapkan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran sebagai bahan pertimbangan penyesuaian strategi atau revisi anggaran.

2. 6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa merupakan IKU baru pada tahun 2025. Pada tahun 2025, target Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 100 dan telah tercapai sebesar 120 atau 120% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.30

Capaian IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Tahun 2025

| KPKNL | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | | | | | | | |
|-----------|---|------|------|--------|--------|------|------|--------|
| Palu | 6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Max/ |
| Realisasi | 120 | 120 | 120 | 87,50 | 87,50 | 120 | 120 | TLK |
| Capaian | 120% | 120% | 120% | 87,50% | 87,50% | 120% | 120% | |

Langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Palu, sebagai berikut :
Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan pengadaan berdasarkan DIPA terkini.

3. 6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Pada tahun 2025, target persentase pengembangan kompetensi pegawai pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 80% dan telah tercapai sebesar 98% atau sebesar 122,50% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.25

Capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2025

| KPKNL | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | | | | | | | |
|-----------|---|------|------|------|--------|------|------|--------|
| Palu | 6c-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 20% | 40% | 40% | 60% | 60% | 80% | 80% | Max/ |
| Realisasi | 32% | 74% | 74% | 86% | 86% | 98% | 98% | TLK |
| Capaian | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Tabel 3.26

Perbandingan Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2021-2025

| Tahun/Uraian | Target Awal | Target Adendum | Realisasi | %Realisasi Awal | %Realisasi Adendum |
|--------------|-------------|----------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 2021 | 100% | | 120% | 120% | |
| 2022 | 100% | | 120% | 120% | |
| 2023 | - | | - | - | |
| 2024 | 90% | | 110,50% | 122,78% | |
| 2025 | 80% | | 98% | 122,50% | |

Langkah-langkah strategis KPKNL Palu dalam pencapaian target, sebagai berikut :

- a. Menyusun pedoman program pengembangan kompetensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pasca kegiatan pengembangan kompetensi.
- b. Memberikan kesempatan pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi.
- c. Menciptakan kolaborasi yang baik dengan seluruh pengampu kegiatan bimbingan mental yang mencakup bidang rohani, kompetensi, ideologi, dan kejiwaan.

G. Sasaran Strategis 7: Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1. 7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum

IKU Indeks penanganan permasalahan hukum merupakan IKU baru pada tahun 2025. Pada tahun 2025, target Indeks penanganan permasalahan hukum pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 100 dan telah tercapai sebesar 116,07 dari target yang dibebankan.

Tabel 3.30

Capaian IKU Indeks penanganan permasalahan hukum Tahun 2025

| KPKNL Palu | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | | | | | | | |
|---------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | 7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Max/ |
| Realisasi | 116,68 | 115,03 | 115,03 | 116,10 | 116,10 | 116,07 | 116,07 | TLK |
| Capaian | 116,68% | 115,03% | 115,03% | 116,10% | 116,10% | 116,07% | 116,07% | |

Langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Palu, sebagai berikut :

Melaksanakan penanganan perkara sesuai dengan tahapan yang berjalan.

2. 7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

Pada tahun 2025, target indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 80 dan telah tercapai sebesar 112,75 atau sebesar 140,94% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.34

Capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) Tahun 2025

| KPKNL Palu | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | | | | | | | |
|---------------|---|------|--------|------|--------|------|--------|--------|
| | 7b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Max/ |
| Realisasi | 115 | 110 | 112,50 | 110 | 111,67 | 116 | 112,75 | AVG |
| Capaian | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Tabel 3.35

Perbandingan Realisasi Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) Tahun 2023-2025

| Tahun/Uraian | Target Awal | Target Adendum | Realisasi | %Realisasi Awal | %Realisasi Adendum |
|--------------|-------------|----------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 2023 | 100 | | 100 | 100% | |
| 2024 | 80 | | 100 | 120% | |
| 2025 | 80 | | 112,75 | 120% | |

Langkah-langkah strategis KPKNL Palu dalam pencapaian target, sebagai berikut :

- a. Melakukan pelaporan informasi publik secara tepat waktu.
- b. Melakukan penyediaan informasi publik dan pemutakhiran informasi publik secara berkala pada Website dan Media Sosial Resmi Kantor.
- c. Menyampaikan informasi publik atas permintaan pengguna layanan secara tepat waktu.

H. Sasaran Strategis 8 Pengawasan Dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko Yang Efektif**Indikator Kinerja Utama (IKU) :****1. 8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko**

Pada tahun 2025, target indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 85 dan telah tercapai sebesar 93,30 atau sebesar 116,63% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.27

Capaian IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2025

| KPKNL Palu | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | | | | | | | |
|---------------|---|-------|---------|------|---------|---------|---------|--------|
| | 8a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Max/ |
| Realisasi | 96,94 | 84,55 | 90,06 | 100 | 93,61 | 93,30 | 93,30 | TLK |
| Capaian | 120% | 105% | 112,57% | 120% | 117,61% | 116,63% | 116,63% | |

Tabel 3.28

Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2023-2025

| Tahun/Uraian | Target Awal | Target Adendum | Realisasi | %Realisasi Awal | %Realisasi Adendum |
|--------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 2023 | 80 | | 96,58 | 120,72% | |
| 2024 | 85 | | 96,43 | 113,45% | |
| 2025 | 80 | | 93,30 | 116,63% | |

Langkah-langkah strategis KPKNL Palu untuk mendapatkan kinerja dan risiko yang berkualitas, sebagai berikut :

- a. Untuk kinerja pegawai, telah dilakukan edukasi secara terus menerus kepada seluruh pegawai mengenai manajemen kinerja yang baik, terukur, dan berkontribusi pada kinerja organisasi.
 - b. Melakukan dokumentasi perencanaan manajemen kinerja organisasi dan risiko;
 - c. Melakukan monitoring data capaian kinerja organisasi;
 - d. Mengkompilasi Rencana Aksi dan Mitigasi pencapaian target kinerja pada masing-masing unit.
- 2. 8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM**
- IKU Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM merupakan IKU baru pada tahun 2025. Pada tahun 2025, target Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 100 dan telah tercapai sebesar 120 dari target yang dibebankan.

Tabel 3.30

Capaian IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Tahun 2025

| KPKNL Palu | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | | | | | | | |
|---------------|--|------|------|------|--------|------|------|--------|
| | 8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Max/ |
| Realisasi | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | TLK |
| Capaian | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Palu, sebagai berikut :

Melaksanakan kegiatan ZI-WBK sesuai dengan pedoman yang ada

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

1. Perencanaan RPD yang kurang tepat dari penanggung jawab RO sehingga perlu dilakukan penyusunan yang lebih cermat dan akurat, serta telah melakukan pencatatan arsip inaktif dan penilaian kembali aset yang akan dihapuskan.
2. Terjadi peningkatan kesadaran sebagian Satuan Kerja terhadap pentingnya optimalisasi BMN melalui pendampingan yang dilakukan KPKNL. Namun pelaksanaan program sertifikasi BMN berupa tanah masih terkendala oleh data tanah satker yang menjadi target sertifikasi (riwayat, lokasi, dan batasbatas tanah) belum tersedia secara lengkap dan valid. KPKNL Palu selalu melakukan pendampingan kepada satker, mulai dari tahap verifikasi dokumen awal, proses koordinasi dengan pihak pertanahan, sampai dengan terbitnya sertipikat.
3. KPKNL Palu kerap melakukan sharing knowledge dalam bentuk edukasi dan komunikasi baik secara internal, maupun kepada eksternal/stakeholder berkenaan dengan dinamika regulasi terkait pengelolaan BMN, peraturan lelang, penilaian, serta piutang negara dengan harapan dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam menerjemahkan peraturan yang ada.
4. Dalam pengelolaan BKPN, Seksi Piutang Negara kerap melakukan penelitian dan mempelajari kembali Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang berpotensi untuk dapat diselesaikan dengan kegiatan pemeriksaan berkas maupun *stock opname*, melakukan kegiatan penagihan kepada debitur baik secara langsung maupun tidak

langsung, serta giat mensosialisasikan secara masif adanya crash program keringanan utang melalui berbagai sarana.

5. KPKNL Palu melakukan publikasi melalui berbagai saluran media baik media online, cetak maupun secara langsung kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan, dengan memberikan penjelasan bahwa jual beli melalui lelang di KPKNL memang secara prinsip adalah untuk kondisi fisik apa adanya, sehingga calon pembeli disarankan untuk mengecek kondisi barang sebelum mengikuti lelang, tidak berhenti disitu, KPKNL juga terus menyampaikan bahwa meskipun secara fisik dijual apa adanya, tetapi secara dokumen formil telah dilakukan verifikasi oleh Pelelang sehingga dirasa lebih aman bagi calon pembeli. Pelaksanaan lelang dengan *e-auction* memastikan bahwa proses lelang berjalan secara lebih adil dan transparan

KINERJA LAINNYA

Pada tahun 2025, KPKNL Palu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa dan pemangku kepentingan demi memberikan pelayanan yang baik dan mengedepankan pengarusutamaan gender. KPKNL Palu juga melaksanakan sosialisasi terkait Pengarusutamaan Gender dan memelihara fasilitas penunjang Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti area bermain dan ruang laktasi di area pelayanan terpadu, menyediakan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas, . Adapun komposisi pegawai di KPKNL Palu terdiri dari 15 pegawai laki-laki dan 13 pegawai perempuan.

REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan keuangan diarahkan pada efisiensi pengeluaran dan penggunaan dana seoptimal mungkin. Berdasarkan data yang ada, sampai dengan 31 Desember 2025 terhitung realisasi belanja unit KPKNL Palu pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.429.481.755,00 atau 96,01% dari total pagu revisi dalam DIPA KPKNL Palu sebesar Rp2.530.331.000,00. Realisasi penggunaan anggaran DIPA tahun 2025 secara terperinci adalah sebagai berikut:

Tabel 3.37

Realisasi Anggaran KPKNL Palu Tahun 2025 per Jenis Belanja (dalam Rupiah)

| Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Penyerapan |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Barang | 2.117.641.000 | 2.017.543.842 | 95.27% |
| Belanja Modal | 412.690.000 | 411.937.913 | 99.82% |
| Total | 2.530.331.000 | 2.429.481.755 | 96.01% |

Tabel 3.38

Realisasi Output KPKNL Palu Tahun 2025

| Output (satuan) | Pagu | Realisasi | Penyerapan |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara | 109.505.000 | 108.937.258 | 99.48% |
| Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan | 9.656.000 | 9.656.000 | 100.00% |
| Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset | 59.048.000 | 58.862.054 | 99.69% |
| Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) | 0 | 0 | Tidak ada RO |
| Rekomendasi Hasil Penilaian | 14.680.000 | 14.680.000 | 100.00% |
| Aset BUN yang Dikelola | 15.120.000 | 15.120.000 | 100.00% |
| Risalah Lelang | 32.736.000 | 29.488.200 | 90.08% |
| Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU) | 0 | 0 | Tidak ada RO |
| Penggalian Potensi Lelang | 20.327.000 | 18.457.066 | 90.80% |
| Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara | 87.193.000 | 85.449.000 | 98.00% |
| Layanan Bantuan Hukum | 47.722.000 | 43.083.760 | 90.28% |
| Kehumasan | 30.868.000 | 29.865.099 | 96.75% |
| Pembinaan/Edukasi Publik | 1.040.000 | 590.000 | 56.73% |
| Rekomendasi Kepatuhan Internal | 18.414.000 | 16.442.000 | 89.29% |
| Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang | 0 | 0 | Blokir 100% |
| Sosialisasi Edukasi Bidang Lelang | 0 | 0 | Blokir 100% |
| Kerumahtangaan | 113.108.000 | 112.030.962 | 99.05% |
| Layanan Perkantoran | 1.557.224.000 | 1.474.722.443 | 94.70% |
| Kendaraan Bermotor | 397.990.000 | 397.990.000 | 100.00% |
| Fasilitas Perkantoran | 0 | 0 | Tidak ada RO |
| Peralatan Fasilitas Perkantoran | 14700000 | 13947913 | 94.88% |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025 adalah merupakan amanat dalam Permenpan Nomor 53 tahun 2014 bahwa Menteri/Pimpinan lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hal tersebut KPKNL Palu menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud, yang merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban hasil perjanjian kinerja yang telah disepakati antara pimpinan dan bawahan dari sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dengan kewenangan yang diberikan dalam melakukan pengelolaan dan penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang, dan sekaligus berperan dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam rangka peningkatan good governance. Pengukuran kinerja sasaran didasarkan pada penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2025 telah ditetapkan 8 sasaran strategis dan 19 IKU yang merupakan indikator Kontrak Kinerja KPKNL Palu tahun 2025.

Secara umum, seluruh pencapaian sasaran strategis selama tahun 2025 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tanpa ada satu IKU pun yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja secara keseluruhan tersebut merupakan hasil kerja seluruh staf, pegawai dan pejabat di jajaran KPKNL Palu termasuk pegawai pemerintah non pegawai negeri serta pegawai outsource.

Dengan menganalisa IKU tersebut, maka dapat dibuat Action Plan yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kinerja pada KPKNL Palu pada tahun berikutnya. Untuk meningkatkan jumlah frekuensi lelang pada tahun 2026, KPKNL Palu akan melakukan penggalian potensi lelang ke instansi/lembaga yang beragam dan sosialisasi serta penyebaran informasi ke masyarakat umum.

Sedangkan berkaitan dengan pengurusan piutang negara, pada tahun 2026 KPKNL Palu akan lebih mengoptimalkan penegakan hukum dalam pengurusan Piutang Negara Kementerian dan Lembaga dan Piutang Daerah. Khusus Piutang Daerah akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Anggota PUPN Cabang yang berasal dari Unsur Pemerintah Daerah yang merupakan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diharapkan pada tahun 2026 akan lebih ditingkatkan baik proses penilaian dan pengelolaan maupun edukasi kepada instansi pengguna layanan. Perlu sinergi dalam melakukan peran DJKN dalam pengelolaan BMN sehingga diharapkan memberi dampak bagi penerimaan Negara, dan aset Negara dapat dioptimalkan agar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat

Kiranya Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan pedoman yang harus diimplementasikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pada periode berikutnya, sehingga di masa yang akan datang KPKNL Palu dapat semakin tampak potensinya, meningkatkan kinerjanya, dan makin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah yang memberikan pelayanan yang profesional.

LAMPIRAN



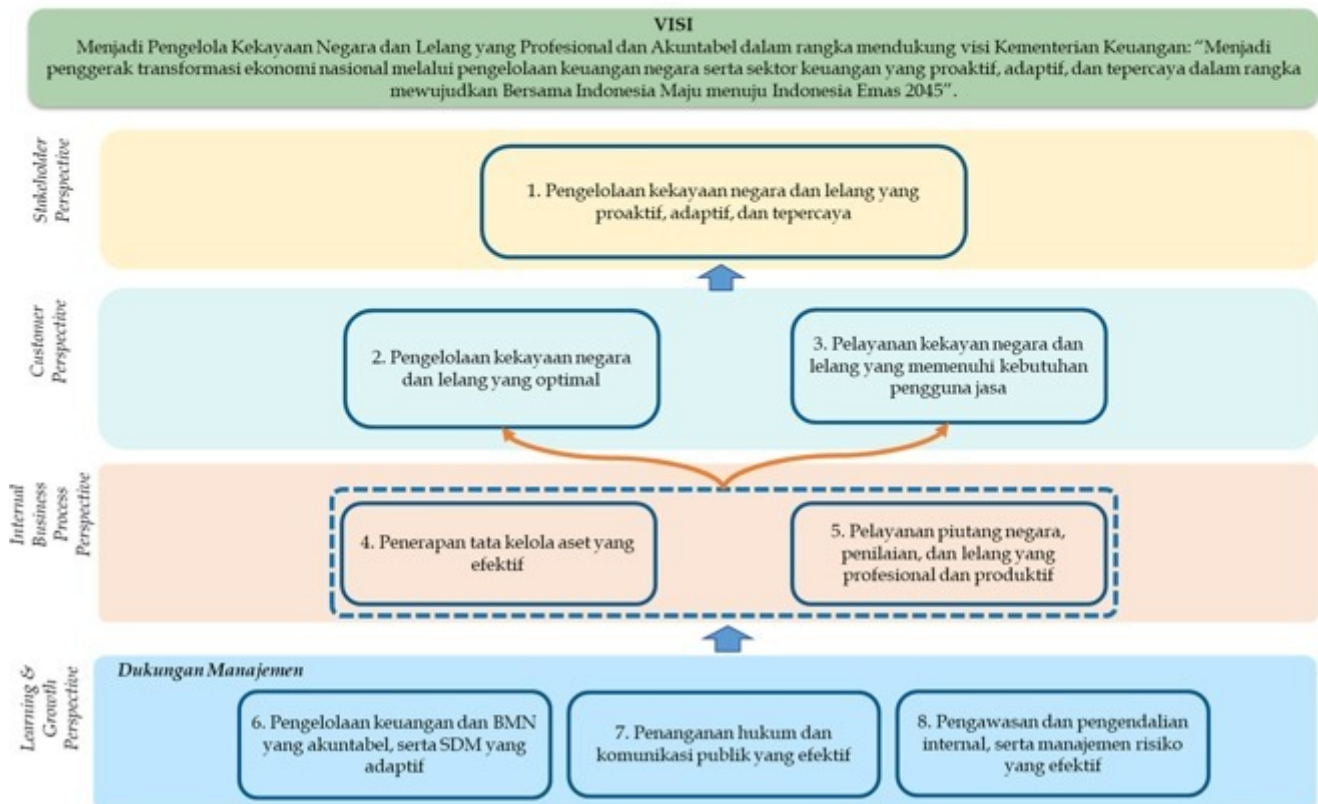
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-3/WKN.16/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PALU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PALU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | | Target |
|-----|---|-------------------|--|--------------------|
| 1 | Pengelolaan Kekayaan Negara yang proaktif, adaptif dan terpercaya | 1a-CP | Indeks integritas | 100 |
| | | 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% (Rp29,3M) |
| 2 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal | 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100% |
| | | 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% (Rp147,7M) |
| | | 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% (Rp1M) |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | 3a-CP | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 |
| | | 3b-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | 4a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 100% |
| | | 4b-CP | Persentase evaluasi kinerja BMN | 100% |
| 5 | Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang profesional dan produktif | 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% |
| | | 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% |
| | | 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | 80% |
| 6 | Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | 6a-CP | Indeks kualitas Kinerja Anggaran | 100 |
| | | 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 |
| | | 6c-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 80% |
| 7 | Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif | 7a-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 |
| | | 7b-N | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal serta manajemen risiko yang efektif | 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 |
| | | 8b-N | Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100 |

Program/Kegiatan 2025

Anggaran



Program:

Pengelolaan Perbendaharaan ,Kekayaan Negara dan risiko Rp508,454,000

Kegiatan

1. Komunikasi, edukasi dan standarisasi Rp58,774,000
2. Pengelolaan Aset Rp449,680,000

Program:

Dukungan Manajemen Rp2,308,347,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi Rp76,176,000
2. Pengelolaan Keuangan BMN dan umum Rp2,100,783,000
3. Pengelolaan komunikasi dan Informasi Publik Rp57,732,000
4. Pengeloalaan risiko Pengendalian dan pengawasan Rp73,656,000

PALU SELATAN, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah,
Gorontalo dan Maluku Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
R. Ay. Indriasari Sundoro

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Palu



Ditandatangani Secara Elektronik
Jerry Max Nelson Piri



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PALU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

| Kode SS/IKU | SS/IKU | Target | | | | | | |
|-------------|---|--------|------|--------|------|--------|------|---------------------|
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 1 | Pengelolaan Kekayaan Negara yang proaktif, adaptif dan terpercaya | | | | | | | |
| 1a-CP | Indeks integritas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp29,3 M) |
| 2 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal | | | | | | | |
| 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 50% | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp147,7 M) |
| 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp1M) |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | | | | | | | |
| 3a-CP | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 3b-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | | | | | | | |
| 4a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 5% | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| 4b-CP | Persentase evaluasi kinerja BMN | 15% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 5 | Pelayanan Piutang Negara , Penilaian dan Lelang yang profesional dan produktif | | | | | | | |
| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | 30% | 40% | 40% | 70% | 70% | 80% | 80% |
| 6 | Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel , serta SDM yang adaptif | | | | | | | |
| 6a-CP | Indeks kualitas Kinerja | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



| Kode SS/IKU | SS / IKU | Target | | | | | | |
|----------------|---|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| | Anggaran | | | | | | | |
| 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6c-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 20% | 40% | 40% | 60% | 60% | 80% | 80% |
| 7 | Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif | | | | | | | |
| 7a-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7b-N | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal serta manajemen risiko yang efektif | | | | | | | |
| 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 8b-N | Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

PALU SELATAN, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Palu



Ditandatangani Secara Elektronik
Jerry Max Nelson Piri



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

| No. | SS/IKU | Inisiatif Strategis | Output/Outcome | Trajectory | | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|-----|--------|---------------------|----------------|------------|----------|--------|---------------------|------------------|------------|
| | | | | Waktu | Kegiatan | Output | | | |
| | | | | | | | | | |

PALU SELATAN, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palu



Ditandatangani Secara Elektronik
Jerry Max Nelson Piri



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

| PEGAWAI YANG DINILAI | | | PEJABAT PENILAI KINERJA | |
|-----------------------|---|--|-------------------------|--|
| NAMA | Jerry Max Nelson Piri | | NAMA | R. Ay. Indriasari Sundoro |
| NIP | 19680329 199103 1 001 | | NIP | 19750219 199503 2 001 |
| PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina Tingkat I (IV/b) | | PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| JABATAN | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palu | | JABATAN | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara |
| UNIT KERJA | Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palu | | UNIT KERJA | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara |
| NO | RENCANA HASIL KERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | TARGET | PERSPEKTIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A. UTAMA | | | | |
| 1 | Pengelolaan Kekayaan Negara yang proaktif, adaptif dan terpercaya | Indeks integritas | 100 | Penerima Layanan |
| | | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% (Rp29,3M) | Penerima Layanan |
| 2 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100% | Penerima Layanan |
| | | Persentase realisasi pokok lelang | 100% (Rp147,7M) | Penerima Layanan |
| | | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% (Rp1M) | Penerima Layanan |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 | Penerima Layanan |
| | | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 | Penerima Layanan |

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



| | | | | |
|-------------|--|---|------|----------------------------------|
| | kebutuhan pengguna jasa | | | |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 100% | Proses Bisnis |
| | | Persentase evaluasi kinerja BMN | 100% | Proses Bisnis |
| 5 | Pelayanan Piutang Negara , Penilaian dan Lelang yang profesional dan produktif | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% | Proses Bisnis |
| | | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% | Proses Bisnis |
| | | Persentase produktivitas lelang | 80% | Proses Bisnis |
| 6 | Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel , serta SDM yang adaptif | Indeks kualitas Kinerja Anggaran | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 80% | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 7 | Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal serta manajemen risiko yang efektif | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| B. TAMBAHAN | | | | |



| PERILAKU KERJA | | |
|----------------|--|---|
| 1 | Berorientasi pelayanan | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p> |
| 2 | Akuntabel | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p> |
| 3 | Kompeten | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p> |
| 4 | Harmonis | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p> |
| 5 | Loyal | |



| PERILAKU KERJA | | |
|----------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p> |
| 6 | Adaptif | |
| | <ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p> |
| 7 | Kolaboratif | |
| | <ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p> |



PALU SELATAN, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

R. Ay. Indriasari Sundoro
19750219 199503 2 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Jerry Max Nelson Piri
19680329 199103 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

| DUKUNGAN SUMBER DAYA | | | | | | | | |
|---|--|--------|------|-------|------|--------|------|---------------------|
| 1. | 25 pegawai | | | | | | | |
| 2. | <i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i> | | | | | | | |
| SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN | | | | | | | | |
| <i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i> | | | | | | | | |
| No | IKI | Target | | | | | | |
| | | Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 1a-CP | Indeks integritas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp29,3M) |
| 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 50% | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp147,7 M) |
| 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp1M) |
| 3a-CP | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 3b-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



| | | | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 4a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 5% | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| 4b-CP | Persentase evaluasi kinerja BMN | 15% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | 30% | 40% | 40% | 70% | 70% | 80% | 80% |
| 6a-CP | Indeks kualitas Kinerja Anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6c-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 20% | 40% | 40% | 60% | 60% | 80% | 80% |
| 7a-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7b-N | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 8b-N | Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KONSEKUENSI | | | | | | | | |
| <i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i> | | | | | | | | |



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PALU SELATAN, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

R. Ay. Indriasari Sundoro
19750219 199503 2 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Jerry Max Nelson Piri
19680329 199103 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

